

# **PENGARUH PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TOGUNGGUH DAN DESA TELAGABIRU KECAMATAN TANJUNGBUMI KABUPATEN BANGKALAN\***

**Dewi Sri Nurainingsih**

Sekretariat Pemda Kabupaten Bangkalan,  
Jl. Soekarno-Hatta No. 32 Bangkalan, Telp. (031) 3098577

## ***Influence of Village Development Program on Community Empowerment at Togungguh Village and Telagabiru Village Tanjungbumi Subdistrict Bangkalan Regency***

*This research aims at analyzing the village development program and community empowerment at Togungguh Villagae and Telagabiru Village. It also intends to examine the influence of Village Development Program on those two villages. Village Development Program as the independent variable comprise the aspects of education, health and purchasing power. Meanwhile, community empowerment as the dependent variable covers income raising, community participation, improved skill and knowledge, and improved health.*

*The result shows that the Village Development Program at Tanjungbumi Subdistrict does not optimally perform mainly due to several reasons: the community's insufficient understanding of the importance of balanced nutrients, uneven distribution of cheap basic necessities, and poor infrastructures for elementary and secondary education. These conditions contribute to inconsiderable level of community empowerment. In addition, village administrative officials do not adequately socialize the program to the whole community. Thus, the community do not have the opportunity to utilize the facilities that the government has provided for the development of their income-raising activities. Further more, the community are perceived to be less innovative in developing local potentials.*

*Keywords: village development, education, health, purchasing power, community empowerment, income raising, community participation, improved skill and knowledge improvement, improved health.*

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian perubahan yang dilakukan secara sadar, berencana, sistematis dan berkesinambungan, dari keadaan tertentu menuju kehidupan yang lebih baik. Pemahaman ini sejalan dengan hakekat pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan manusia menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena semakin berdayanya manusia akan meningkatkan keberdayaan masyarakat secara kolektif. Hal tersebut akan berujung pada peningkatan kinerja pembangunan wilayah berdasarkan tujuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam praktik, masih banyak wilayah

---

\* Ditulis di bawah bimbingan Drs. Ucky Padmadiredja, Dipl, RDP dan Ono Taryono, S.Pd, MA

yang belum tersentuh oleh pembangunan. Salah satu indikasi belum meratanya pembangunan adalah tingkat pengangguran.

Salah satu kabupaten yang nampaknya 'tertinggal' dalam konteks pembangunan adalah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten lainnya di pulau Madura yaitu Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, tingkat pengangguran termasuk tinggi. Sebagai contoh pengangguran di desa Togungguh mencapai 21,6 % dari jumlah usia kerja sebanyak 1.776 orang dan di desa Telaga Biru pengangguran warga mencapai 45,5% dari jumlah usia kerja 1.018 orang. Padahal di daerah ini terdapat berbagai potensi yang dapat dikembangkan, misalnya sektor pertanian, peternakan, perikanan.

Selain itu, berdasarkan pengamatan, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya relatif rendah. Hal ini terlihat pada pelaksanaan Musrenbangdes hanya dihadiri oleh sebagian kecil masyarakat. Lemahnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial masyarakat dalam suatu pembangunan.

Sarana pendidikan di Desa Togungguh nampaknya belum memadai dan relatif jauh untuk dijangkau oleh masyarakat. Sebagai contoh, untuk mencapai Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) diperlukan waktu tidak kurang dari 2 jam dari rumah Kepala Desa Togungguh dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan tingkat serapan ilmu dari siswa kuranglah optimal yang mengakibatkan rendahnya kualitas mereka.

Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas daerah adalah Program Dasar Pembangunan Desa. Melalui program ini diharapkan pembangunan dapat lebih merata. Dengan meratanya pembangunan, diharapkan kemiskinan dapat dientaskan dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Program Dasar Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan dan/atau mempercepat pemenuhan pelayanan dasar umum (Standar Pelayanan Minimal), seperti Pendidikan Pra Sekolah (TK), Pendidikan Dasar (SD), sarana kesehatan, sarana transportasi, dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Dasar Pembangunan Desa belum dapat memberdayakan masyarakat secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena yang penulis temukan di lapangan.

Pertama, dalam memberdayakan masyarakat diperlukan masyarakat yang handal. Namun realitas yang terjadi, masih banyak masyarakat desa yang berpendidikan rendah sehingga belum nampak yang sesuai dengan pola pikir yang handal untuk merencanakan pembangunan.

Kedua, kurangnya upaya dari Pemerintah Daerah dalam bidang pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan fisik, misalnya: jalan aspal, saluran irigasi, jembatan, padahal masyarakat lebih membutuhkan pelatihan cara bertani yang baik, pelatihan model batik, dan keterampilan.

Ketiga, masyarakat banyak tidak mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga kurang aktif dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, banyak kegiatan pembangunan yang belum didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam mengawasi dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Keempat, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih rendah, sehingga kurang mampu dalam mengelola potensi lokal untuk pemanfaatan kebutuhan hidup dan tidak dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Padahal daerah ini memiliki

berbagai potensi (lahan pertanian) yang dapat dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari pemaparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Program Dasar Pembangunan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Togungguh dan Desa Telagabiru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Dalam penelitian ini, penulis sajikan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti.

### **1. Administrasi Pembangunan**

Menurut Montgomery dan Esman (1965): "Administrasi pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan daripada pemerintah dan juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (*administration of development*) ". Adapun menurut Siagian (2000: 5): "Administrasi pembangunan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara dan bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir".

Sementara itu, Mustopadidjaja (1996: 23) menyatakan sebagai berikut: "Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan, sehingga dengan demikian sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif". Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu ilmu dan seni tentang upaya pembangunan administrasi negara kearah pencapaian tujuan-tujuan pembangunan untuk tumbuh dan berkembang dalam semua aspek kehidupan.

### **2. Tujuan dan Keberhasilan Pembangunan Desa**

Tujuan pembangunan desa menurut Depdagri (1994: 4), adalah sebagai berikut: pertama, meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat baik lahiriah maupun batiniah. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan beserta aparat untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan swadaya gotong royong, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan desa diarahkan untuk: (1) Meletakkan dasar-dasar sosial ekonomi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional; (2) Mempercepat pertumbuhan menjadi desa swasembada; (3) Mengubah kedudukan desa dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan; dan (4) Menjadi dasar dalam menetapkan ketahanan nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan desa yang berhasil adalah pembangunan desa yang mampu mencapai tujuan dan sesuai dengan arah pembangunan desa. Namun demikian, terkait dengan tujuan pembangunan desa, Ndraha (1985:24-25) menyatakan bahwa pembangunan desa/kelurahan dikatakan berhasil apabila: (1) Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan; (2) Rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan; (3) Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang, telah dapat ditingkatkan; (4) Prasarana fisik telah dibangun; dan (5) Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan banyak adalah *Human Development Indeks (HDI)*, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Indeks

Pembangunan Masyarakat (IPM). Ukuran ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan ukuran lainnya, karena ukuran ini menyangkut tentang kebutuhan dasar dari manusia yakni pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli. Menurut United Nation Development Program (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 73), ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; dan (3) Daya beli.

### 3. Program Pembangunan Desa

Program merupakan instrumen kebijakan dari aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai organisasi pelaksana kebijakan publik yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk berbagai kegiatan sebagai langkah konkrit dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Program pembangunan desa sebagai upaya pemerataan dana pembangunan, diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pihak desa dalam mengakselerasi pembangunan di wilayahnya.

Program Dasar Pembanguana Desa bertujuan untuk meningkatkan dan atau mempercepat pemenuhan pelayanan dasar umum (Standar Pelayanan Minimal), seperti Pendidikan, kesehatan, sarana Transportasi dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu pos sumber pendapatan desa berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2006 Tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010 yakni merupakan bagian dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola dana program pembangunan desa yaitu: (1) Transparan, seluruhnya kegiatan harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; (2) Partisipatif, seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam seluruh proses/tahap pelaksanaan; (3) Akuntabel, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif; dan (4) *sustainable*, yaitu hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat

### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Oxford English Dictionary (Pranarka, 1996: 3) pemberdayaan dimaknai sebagai berikut: "Kata *empower* mengandung 2 (dua) arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai pemberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau delegasi otoritas kepada pihak lain. sedangkan dalam pengertian yang kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan". Priyono dan Pranarka (1996: 56) menjelaskan konsep pemberdayaan sebagai berikut: "Upaya untuk menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, dan lain-lain".

Selanjutnya Priyono dan Pranaka (1996: 56) mengatakan bahwa pengertian pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu: pertama, pemberdayaan menekankan pada proposal memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sementara itu, Chambers (Kartasasmita, 1996: 142), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah: "Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial

dan mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centred*, *participatory*, dan *sustainable*". Kemudian Kartasmita (1996: 144) menjelaskan: "Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat".

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan (*powerlessness*) individu dan masyarakat. Selain itu pemberdayaan merupakan upaya mengatasi adanya perasaan tidak mampu secara emosional dan sosial dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri.

## 5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan merupakan langkah-langkah dalam proses pemberdayaan yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yang berpedoman pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pemberdayaan menurut Cook dan Macaulay (1996: 24) dapat dicapai dengan delapan langkah utama yaitu: (1) Hubungan dengan visi; (2) Diarahkan dengan menggunakan contoh; (3) Berkomunikasi secara aktif; (4) Meninjau struktur organisasi; (5) Menguatkan kerja tim; (6) Mendorong pengembangan pribadi; (7) Menjadi jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus; dan (8) Mengukur perkembangan yang terjadi dan kenali serta harga keberhasilan.

Sedangkan menurut Kartasmita (1996: 159-160) upaya pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan melalui tiga proses. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat diperspektifkan oleh masyarakat dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini membutuhkan langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*), yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Proses pemberdayaan masyarakat harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Dalam kaitannya dengan ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat, Kartasmita (1997: 14) menyatakan sebagai berikut: "... indeks *Gini*, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya... Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Di bidang ini, juga telah banyak ukuran dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi dan rata-rata umur harapan hidup".

Berdasarkan pendapat di atas, maka ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat mengacu pada indeks kesejahteraan internasional yang dikembangkan oleh UNDP, dikenal dengan nama *Human Development Indeks* (HDI), indeks pembangunan manusia ini menganggap tiga pilihan yang paling penting dalam kemasyarakatan yakni kesehatan dengan umur yang panjang, memiliki pendidikan yang dapat diandalkan, serta memiliki akses yang maksimal terhadap sumber daya yang dapat dikatakan sebagai hidup yang layak.

Adapun Sumodiningrat (1999: 138) mengemukakan bahwa indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terdiri dari: (1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin; (2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; (3) Meningkatkan kepedualian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; (4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat; dan (5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin, peningkatan pendapatan, peningkatan kemandirian, peningkatan kepedualian masyarakat/peran serta, peningkatan pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan peningkatan kapasitas diri.

### C. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, yang dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode survey, dengan tingkat eksplanasi kausal yang dideskripsikan dengan menggunakan regresi linier. Penelitian eksplanasi atau penelitian penjelasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Singarimbun (1995:4) adalah: "Hubungan antara dua variabel menunjukkan hubungan kausal apabila perubahan dalam variabel independent (X) menyebabkan perubahan dalam variabel dependen (Y) dan perubahan tersebut dapat diuji dengan memeriksa dipenuhinya kondisi berikut: (1) Ada hubungan antara variabel X dan Y; (2) Hubungan antara X dan Y adalah hubungan asimetrikal dimana perubahan dalam X menghasilkan perubahan dalam Y, tetapi bukan sebaliknya; dan (3) Urutan waktu, perubahan dalam variabel x terjadi lebih dahulu baru kemudian terjadi perubahan dalam Y".

Bertitik tolak pada permasalahan dan metode penelitian penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0: \beta = 0$  Program dasar Pembangunan Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Togungguh dan Desa Telaga Biru di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
- $H_1: \beta \neq 0$  Program dasar pembangunan desa berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Togungguh dan Desa Telaga Biru di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua) desa yaitu Desa Togungguh dan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Biru Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk  $\pm$  7.006 orang. Sedangkan sampelnya, yang jumlahnya ditentukan dengan rumus Slovin, sebanyak 100 orang.

Mengingat lokus penelitian ada di dua desa, maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel, *proportionate random sampling*. Melalui teknik ini diperoleh jumlah sampel 56 orang untuk Desa Togungguh dan 44 orang untuk Desa Telaga Biru.

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan ada dua jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi. Sedangkan data primer dikumpulkan dengan teknik, penyebaran kuesioner dan wawancara.

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a)

editing; (b) coding; (c) tabulating; dan (d) scoring. Untuk menafsirkan data/skor hasil penelitian, penulis menyusun tabel kategorisasi persepsi seperti terlihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Tabel Kategori Penilaian**

Persentase	Kategori Penilaian
84,00 - 100,00	Sangat Baik
68,00 - 83,99	Baik
52,00 - 67,99	Cukup Baik
36,00 - 51,99	Tidak Baik
20,00 - 35,99	Sangat Tidak Baik

Penelitian ini menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{(n \sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

$\sum XY$  : Total hasil kali variabel X dan Y

$\sum X^2$  : Total kuadrat variabel X

$\sum Y^2$  : Total kuadrat variabel Y

Mengingat korelasi yang digunakan adalah *Product Moment* yang mensyaratkan data berskala interval, maka data yang penulis peroleh dari instrumen kuesioner diubah dengan menggunakan teknik *Method Successive Of Interval* (MSI).

Adapun untuk melihat kuatnya hubungan variabel X terhadap variabel Y, penulis menggunakan interpretasi koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sugiono (2002: 216) seperti terlihat dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Sedang
0,20 - 0,399	Rendah
0,00 - 0,199	Sangat rendah

Sumber : Sugiono, 2002:216

Untuk mengetahui koefisien regresi atau pengaruh program dasar pembangunan desa sebagai variabel X terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai variabel Y, maka menggunakan regresi linier sederhana dengan persamaan sebagaimana yang dikemukakan Oleh Sugiono (2002: 244-245):

$$Y = a + bX + e$$

dimana:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad b = \frac{\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$\frac{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$\frac{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan:

$Y$  : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$a$  : Harga  $Y$  bila  $X = 0$  ( harga konstan)

$b$  : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $b (+)$  maka naik, bila  $(-)$  maka terjadi penurunan.

$X$  : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus uji signifikansi 't' (Sudjana, 2002: 377) yaitu :

$$t = r_{xy} \sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}}$$

Kriteria uji menggunakan :

- Derajat kebebasan (dk) =  $n - 2$
- Kemudian  $t_{hit}$  dibandingkan dengan  $t_{tab}$ , ditentukan tingkat kepercayaan sebesar 95 % atau tingkat kesalahan sebesar 5 %.
- Kriteria pengujian hipotesis:
  - Tolak  $H_0$ , jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .
  - Terima  $H_0$ , jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ .

#### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini dilakukan terhadap dua variabel yaitu Program Dasar Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Berikut akan disampaikan hasil penelitian dan analisis data atas kedua variabel tersebut.

##### 1. Program Dasar Pembangunan Desa

Dalam penelitian ini, variabel Program Dasar Pembangunan Desa diukur dengan indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dalam tabel 3 pendidikan diwakili oleh pernyataan nomor 1 s.d. 3, kesehatan diwakili oleh pernyataan nomor 4 s.d 6, sedangkan daya beli diwakili oleh pernyataan nomor 7 s.d. 9.

**Tabel 3**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Program Dasar Pembangunan Desa**

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jml.		%	Kategori
		STS=1		TS=2		RR=3		S=4		SS=5		f	S		
		f	S	f	S	f	S	f	S	f	S				
<b>Pendidikan</b>															
1	Tingkat kecukupan (memadai/tidaknya sarana dan prasarana pendidikan)	0	0	7	14	40	120	32	128	21	105	100	367	73,40	Baik
2	Tingkat kemudahan dan kemurahan pelayanan pendidikan	5	5	49	98	14	42	20	80	12	60	100	285	57,00	Cukup Baik
3	Tingkat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan	0	0	2	4	37	111	38	152	23	115	100	382	76,40	Baik

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jml.	%	Kategori		
		STS=1		TS=2		RR=3		S=4		SS=5						
		f	S	f	S	f	S	f	S	f	S				f	S
	keterampilan															
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>1,67</b>		<b>38,67</b>		<b>91,00</b>		<b>120,00</b>		<b>93,33</b>		<b>344,67</b>		<b>68,93</b>		Baik
<b>Kesehatan</b>																
4	Ketersediaan sarana dan prasaana kesehatan	4	4	6	12	40	120	12	48	38	190	100	374	74,80		Baik
5	Keramahan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan	12	12	11	22	40	120	29	116	8	40	100	310	62,00		Cukup Baik
6	Keterjangkauan pelayanan kesehatan secara finansial	12	12	11	22	37	111	30	120	10	50	100	315	63,00		Cukup Baik
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>9,33</b>		<b>18,67</b>		<b>117,00</b>		<b>94,67</b>		<b>93,33</b>		<b>333,00</b>		<b>66,60</b>		Cukup Baik
<b>Daya Beli</b>																
7	Kemudahan memperoleh bahan pokok	0	0	27	54	42	126	24	96	7	35	100	311	62,20		Cukup Baik
8	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok	0	0	2	4	37	111	37	148	24	120	100	383	76,60		Baik
9	Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat	16	16	53	106	7	21	16	64	8	40	100	247	49,40		Tidak Baik
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>5,33</b>		<b>54,67</b>		<b>86,00</b>		<b>102,67</b>		<b>65,00</b>		<b>313,67</b>		<b>62,73</b>		Cukup Baik
<b>Rata-rata Skor Total</b>		<b>5,44</b>		<b>37,33</b>		<b>98,00</b>		<b>105,78</b>		<b>83,89</b>		<b>330,44</b>		<b>66,09</b>		Cukup Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2008

Dari data pada tabel 3, diperoleh informasi bahwa nilai persentase rata-rata tanggapan responden untuk variabel Program Dasar Pembangunan Desa adalah 66,09%. Jika nilai ini dibandingkan dengan tabel kategori persepsi, maka variabel ini hanya mempunyai kategori **cukup baik**. Nilai persentase yang berujung pada pengkategorian cukup baik tentu tidak terlepas dari aspek-aspek yang menjadi indikator variabel tersebut.

Dari tabel 3 terlihat pula bahwa aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk kategori **baik**. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa keinginan masyarakat terhadap pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah sudah cukup tinggi. Hanya saja masih perlu dibenahi mengenai fasilitas pendidikan terutama kelayakan bangunan dan penambahan ruang kelas. Saat survey dilakukan masih terlihat bahwa sarana penunjang belajar siswa masih belum memadai dan jumlah murid dalam kelas-kelas tertentu masih melebihi kapasitas sehingga proses belajar mengajar kurang nyaman dan pengajaran dari guru menjadi kurang efektif karena terlalu banyak siswa yang harus diperhatikan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Togungguh diketahui bahwa selain kendala seperti yang telah disampaikan sebelumnya, faktor pendidikan juga masih perlu pembenahan dalam jumlah sekolah dasar dan menengah pertama yang dinilai masih kurang. Selain itu lokasi sarana pendidikan masih terlalu jauh dari pemukiman tertentu hingga seorang anak harus menempuh perjalanan selama lebih dari satu jam menuju sekolah.

Sementara untuk aspek kedua yang diujikan dalam indikator pendidikan, yakni mengenai ketersediaan sarana pendidikan yang mudah dan murah dikategorikan **cukup baik**. Hal ini berarti sarana pendidikan yang mudah dan murah relatif terhadap kemampuan finansial masyarakat dapat dianggap belum tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Togungguh, diketahui bahwa upaya peningkatan kemampuan masyarakat memerlukan bantuan dari banyak pihak baik pemerintah, LSM maupun swasta, sehingga beban biaya pendidikan dapat diatasi. Namun hal tersebut baru menjadi agenda dan rencana jangka panjang yang tidak mungkin berproses secara instan. Pemerintah desa hingga saat ini baru berusaha untuk mengupayakan bantuan dana untuk perbaikan sarana pendidikan, hal itu pun baru menyentuh pengadaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) dan buku wajib mata pelajaran tertentu yang dapat siswa gunakan selama pembelajaran di dalam kelas.

Untuk aspek ketiga dalam indikator pendidikan ini, hasil angket menunjukkan bahwa aspek ini dikategorikan **baik**. Berdasarkan wawancara dengan Camat Tanjung Bumi dapat diketahui bahwa, masyarakat desa Togungguh dan Telaga Biru memang memiliki lahan pertanian yang terhitung luas dan cukup bernilai jika dikonversikan menjadi kapital. Namun hal itu tidak memungkinkan karena hingga sekarang mata pencaharian dan keahlian sebagian besar masyarakat adalah bertani. Dengan demikian materi yang dimiliki tidak dapat dinilai sebagai sebuah dana bebas yang dapat digunakan untuk peningkatan pengetahuan.

Sementara itu, secara keseluruhan, indikator **kesehatan** dapat dikategorikan **cukup baik**. Sekalipun terdapat satu aspek yang mendapat kategori baik, namun dua aspek lainnya hanya dipersepsi cukup baik oleh responden. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa indikator ini belum tercapai secara optimal.

Jika melihat data pada tabel 3, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dikategorikan **baik**. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa didapatkan informasi bahwa sarana dan prasarana kesehatan memang telah tersedia hanya masih dianggap kurang memadai dan kurang mencukupi untuk kebutuhan masing-masing desa. Hingga saat ini, sarana puskesmas untuk kecamatan Tanjung Bumi baru ada satu buah.

Aspek kedua dari indikator kesehatan mendapat kategori **cukup baik**. Dari data yang ada pada tabel 3, terlihat bahwa mayoritas responden tidak terlalu antusias dan menyetujui pernyataan yang diajukan. Dengan kata lain mayoritas responden berpendapat bahwa pelayanan yang mereka terima belum ramah dan simpatik.

Untuk aspek ketiga dalam indikator kesehatan ini, yaitu kemurahan/keterjangkauan pembayaran dipersepsi **cukup baik**. Dari data pada tabel 3 dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diebrikan masih kurang terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Tanjung Bumi dapat diketahui bahwa, pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau baru dapat diusahakan sebatas puskesmas yang menyediakan obat-obat generik yang masih terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, kemurahan yang diebrikan didukung oleh pelayanan kartu akses bagi masyarakat yang memiliki kartu tersebut.

Sama halnya dengan indikator kesehatan, indikator **daya beli** secara umum dikategorikan **cukup baik**. Namun demikian, jika tabel 3 diperhatikan dengan lebih seksama, terdapat aspek yang memprihatinkan, yaitu peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data pada tabel 3, diperoleh informasi bahwa aspek kemudahan memperoleh bahan pokok dapat dikategorikan **cukup baik**. Namun mengingat pentingnya ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, tentu hal ini harus menjadi

perhatian khusus dari pemerintah.

Sementara aspek kedua yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok berada pada kriteria **baik**. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sekalipun masyarakat tidak sulit untuk memperoleh beras namun tidak demikian untuk bahan pokok lain yang masih harus didatangkan dari luar daerah sehingga harga beli yang didapatkan masyarakat cukup tinggi. Kondisi jalan yang kurang representatif termasuk salah satu faktor yang mempertinggi biaya transportasi bahan-bahan pokok lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tanjung Bumi didapatkan informasi bahwa sebenarnya aparat desa telah berusaha untuk mencari mekanisme lain, misalnya diversifikasi pangan dan membuka kerjasama dengan koperasi swasta. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih rendah.

Namun hal tersebut masih belum dapat direalisasikan sehubungan jenis tanah yang kurang mendukung usaha diversifikasi juga keahlian petani yang kurang memadai dalam mengelola agrikultur selain padi atau palawija. Sementara pihak swasta untuk membuka koperasi yang menyediakan bahan pokok masih belum tampak yang dikarenakan kecilnya margin keuntungan yang dapat mereka raih jika membuka koperasi di Kecamatan Tanjung Bumi.

Aspek ketiga dalam indikator ini, menggambarkan kondisi yang memprihatinkan karena dipersepsi **tidak baik**. Dengan kata lain, mayoritas responden tidak menyetujui bahwa pembangunan yang terencana dari aparat desa akan dapat meningkatkan daya beli dan penghasilan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa diketahui bahwa mayoritas masyarakat merasa ragu bahwa pembangunan yang direncanakan oleh aparat desa dapat meningkatkan daya beli dan penghasilan mereka. Salah satu penyebab keraguan mereka adalah jika standar pendidikan mayoritas masyarakat belum berubah maka penghasilan akan tetap sulit untuk ditingkatkan.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penelitian ini, variabel Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan indikator peningkatan pendapatan, peningkatan kepedulian masyarakat/peran serta, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan peningkatan kesehatan. Dalam tabel 4 peningkatan pendapatan diwakili oleh pernyataan nomor 1 s.d. 3, peningkatan kepedulian masyarakat/peran serta diwakili oleh pernyataan nomor 4 s.d. 6, peningkatan pengetahuan dan keterampilan diwakili oleh pernyataan nomor 7 s.d. 9, sedangkan peningkatan kesehatan diwakili oleh pernyataan nomor 10 s.d. 12.

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pemberdayaan Masyarakat**

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jml.		%	Kategori
		STS=1		TS=2		RR=3		S=4		SS=5					
		f	S	f	S	f	S	f	S	f	S	f	S		
<b>Peningkatan Pendapatan</b>															
1	Peningkatan perekonomian masyarakat	2	2	31	62	37	111	22	88	8	40	100	303	60,60	Cukup Baik
2	Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat	2	2	24	48	30	90	32	128	12	60	100	328	65,60	Cukup Baik
3	Penciptaan kreativitas	1	1	23	46	38	114	27	108	11	55	100	324	64,80	Cukup Baik

	masyarakat														
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>1,67</b>	<b>52,00</b>	<b>105,00</b>	<b>108,00</b>	<b>51,67</b>	<b>318,33</b>	<b>63,67</b>	Cukup Baik						
<b>Peningkatan Kepedulian/Peran Serta Masyarakat</b>															
4	Peningkatan semangat kebersamaan dan gotong royong	3	3	28	56	40	120	23	92	6	30	100	301	60,20	Cukup Baik
5	Peningkatan keinginan untuk menolong sesama	0	0	16	32	38	114	35	140	11	55	100	341	68,20	Baik
6	Antusiasme dan kepedulian masyarakat terhadap program dasar pembangunan desa	0	0	20	40	39	117	31	124	10	50	100	331	66,20	Cukup Baik
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>1,00</b>	<b>42,67</b>	<b>117,00</b>	<b>118,67</b>	<b>45,00</b>	<b>324,33</b>	<b>64,87</b>	Cukup Baik						
<b>Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan</b>															
7	Kemampuan menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri	5	5	39	78	34	102	21	84	1	5	100	274	54,80	Cukup Baik
8	Inovasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta	0	0	19	38	39	117	35	140	7	35	100	330	66,00	Cukup Baik
9	Pendampingan dari Pemerintah dan pihak swasta untuk mewujudkan masyarakat yang terampil.	12	12	33	66	31	93	24	96	0	0	100	267	53,40	Cukup Baik
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>5,67</b>	<b>60,67</b>	<b>104,00</b>	<b>106,67</b>	<b>13,33</b>	<b>290,33</b>	<b>58,07</b>	Cukup Baik						
<b>Peningkatan Kesehatan</b>															
10	Peran aktif masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan bayi secara terjadwal ke Polindes	6	6	16	32	28	84	43	172	7	35	100	329	65,80	Cukup Baik
11	Rutinitas pemeriksaan kesehatan masyarakat desa di Polindes	2	2	13	26	30	90	43	172	12	60	100	350	70,00	Baik
12	Pelaksanaan peningkatan gizi balita oleh masyarakat desa	0	0	19	38	21	63	38	152	22	110	100	363	72,60	Baik
<b>Rata-rata Skor</b>		<b>2,67</b>	<b>32,00</b>	<b>79,00</b>	<b>165,33</b>	<b>68,33</b>	<b>347,33</b>	<b>69,47</b>	Baik						
<b>Rata-rata Skor Total</b>		<b>2,75</b>	<b>46,83</b>	<b>101,25</b>	<b>124,67</b>	<b>44,58</b>	<b>320,08</b>	<b>64,02</b>	Cukup Baik						

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2008

Dari data pada tabel 4, diperoleh informasi bahwa nilai persentase rata-rata tanggapan responden untuk variabel Pemberdayaan Masyarakat adalah 64,02%. Jika nilai ini dibandingkan dengan tabel kategori persepsi, maka variabel ini hanya mempunyai kategori **cukup baik**. Nilai persentase yang berujung pada pengkategorian cukup baik tentu tidak terlepas dari aspek-aspek yang menjadi indikator variabel tersebut.

Dari tabel 4 terlihat bahwa indikator peningkatan pendapatan secara keseluruhan hanya dipersepsi **cukup baik** oleh para responden. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa masyarakat belum cukup berdaya untuk meningkatkan pendapatannya.

Untuk aspek pertama dalam indikator yang diujikan, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat, terlihat nilai yang diperoleh dikategorikan **cukup baik**. Berdasarkan hasil

wawancara Kepala Desa didapatkan informasi bahwa, masyarakat telah merasakan adanya dampak positif dari program dasar yang dimaksud, namun belum menyeluruh dan kurang signifikan sehingga hanya golongan tertentu yang menyadari perubahan tersebut. Dengan kata lain, masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari manfaat secara ekonomi dari program tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena program pembangunan desa merupakan sesuatu yang tidak instan dan berproses dalam waktu yang cukup panjang untuk dapat menunjukkan hasil yang signifikan dan menyeluruh.

Sama halnya dengan aspek pertama, aspek kedua yang diujikan, yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat pun mendapat kategori **cukup baik**. Dari data yang ada pada tabel 4, penulis menduga bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini belum tinggi. Pada dasarnya hal ini dapat dimaklumi karena peningkatan taraf hidup memang tidak semata bergantung pada program dasar pembangunan desa, namun pada banyak faktor seperti tingkat pendidikan, motivasi masyarakat untuk maju, potensi daerah yang dapat diangkat dan faktor eksternal yang tidak termasuk lingkup penelitian ini.

Berdasarkan wawancara dengan Camat, diketahui bahwa program yang dicanangkan pemerintah desa sebenarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun hasil dari program tersebut yang belum menyentuh seluruh bagian atau masih parsial. Dengan demikian dirasakan wajar jika sebagian masyarakat bersikap skeptis dan mempertanyakan kesuksesan dari program ini dapat membuat taraf hidup mereka meningkat sehingga bisa hidup layak.

Aspek ketiga dalam indikator ini, yaitu penciptaan kreativitas masyarakat, dikategorikan **cukup baik**. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dapat diketahui bahwa, terobosan-terobosan yang dinyatakan dalam angket mungkin belum terlihat oleh masyarakat. Aparatur desa memang mensosialisasikan adanya kemungkinan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan dan bagaimana hal tersebut dapat membantu masyarakat, namun sebagian masyarakat lebih suka menunggu realisasi terlebih dahulu sebelum percaya sepenuhnya dengan program tersebut.

Di pihak lain, berdasarkan wawancara dengan Camat Tanjung Bumi dapat diketahui bahwa sebetulnya pihak swasta telah terlibat dalam program ini. Salah satu bentuk keterlibatannya adalah pembukaan jalur-jalur baru dalam memasok kebutuhan dasar masyarakat sehingga didapatkan harga yang lebih murah. Selain itu juga terdapat kerjasama dalam hal penyediaan kapital yang dapat digunakan sebagai kredit untuk usaha kecil dan menengah. Namun demikian, nampaknya terobosan ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.

Indikator kedua dalam variabel pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kepedulian/peran serta masyarakat. Jika memperhatikan data pada tabel 4, indikator ini dikategorikan **cukup baik**. Berdasarkan kategori ini dapat dikatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat masih belum optimal.

Aspek kedua pada indikator ini, yaitu peningkatan semangat kebersamaan dan gotong royong, **cukup baik**. Sekalipun persentase yang menyatakan setuju cukup banyak, namun bukan merupakan berasal dari tingginya kesadaran masyarakat tapi semata hasil dari mobilisasi dan pemberian motivasi dari aparat desa yang mana jika aparat berhenti melakukan pembinaan maka semangat kebersamaan itupun akan pudar. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya masyarakat yang menyatakan ragu-ragu.

Berdasarkan wawancara dengan Camat diperoleh informasi bahwa sebenarnya masyarakat Tanjung Bumi telah memiliki budaya kebersamaan sejak awal yang mana semakin menurun seiring dengan perubahan cara berfikir masyarakat yang terutama dipengaruhi oleh perilaku dan pola pikir yang diadopsi dari televisi. Masyarakat

Bangkalan adalah masyarakat yang solid dan berorientasi pada kesejahteraan bersama namun mulai berubah menjadi lebih materialis dan berorientasi pada diri sendiri akibat pola hidup dan berfikir yang ditunjukkan media dimana dianggap lebih maju dan hebat. Para tokoh sangat menyayangkan hal ini karena identitas masyarakat seharusnya dapat dipertahankan tanpa menjadi ketinggalan zaman. Fenomena tersebut melanda sebagian besar masyarakat Bangkalan, yang dalam hal ini termasuk Kecamatan Tanjung Bumi. Sekalipun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang melestarikan nilai-nilai tersebut di lingkungan tinggal mereka.

Sementara untuk aspek kedua yang diujikan dalam indikator kepedulian masyarakat, yakni mengenai animo masyarakat untuk menolong sesama dan harmonis dapat diketahui dari hasil angket bahwa total persentase untuk aspek ini termasuk dalam kategori **baik**. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Togungguh, diketahui bahwa sebenarnya hanya sebagian kecil dari warga di wilayah Tanjung Bumi yang cenderung mengabaikan orang lain dan lebih berfokus pada diri sendiri. Pada umumnya masyarakat selalu ingin tahu mengenai segala sesuatu di lingkungan mereka sehingga setiap ada perkembangan ataupun berita baru akan segera menyebar dan biasanya segera diselesaikan secara musyawarah jika berita tersebut perlu ditindak lanjuti.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan Camat Tanjung Bumi, diketahui bahwa memang masyarakat cenderung reaktif terhadap permasalahan yang perlu diselesaikan. Namun demikian, masyarakat agak sulit untuk diajak melakukan sesuatu yang besar atau terlihat rumit dan panjang seperti pengaturan pembagian air yang lebih banyak untuk suatu wilayah karena di daerah tersebut air lebih mudah untuk diteruskan ke wilayah lain.

Untuk aspek ketiga dalam indikator peningkatan kepedulian masyarakat dikategorikan **cukup baik**. Berdasarkan wawancara Kepala Desa dapat diketahui bahwa, aparat desa telah mensosialisasikan visi, misi dan pola kerja dalam pencapaian tujuan mereka. Sehingga sebagian besar masyarakat sudah mengetahui arah/maksud dari kebijakan yang diberlakukan sebelumnya. Masyarakat cukup peduli dengan hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya hanya sebagian dari masyarakat yang mau terlibat dan diberi tanggung jawab, dimana ada kecenderungan saling melimpahkan dan enggan berkomitmen.

Indikator ketiga dalam variabel pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jika memperhatikan data pada tabel 4, indikator ini dikategorikan **cukup baik**. Berdasarkan kategori ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat masih belum optimal.

Jika dilihat pada tabel 4, mayoritas responden memberikan respon negatif terhadap aspek pertama. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap kemampuan masyarakat dalam bekerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa sebenarnya pesimisme yang mungkin terjadi di masyarakat dikarenakan sulitnya situasi perekonomian dewasa ini, yang mana selain faktor pendanaan yang memerlukan agunan dalam nilai yang relatif cukup tinggi dimana tidak semua masyarakat mampu, juga dipengaruhi oleh adanya paradigma bahwa merintis usaha baru memerlukan relasi yang cukup luas dan dalam upaya perjalanan usaha menuju kemajuan itupun memerlukan waktu yang tidak singkat. Sehingga mayoritas masyarakat lebih cenderung untuk menempatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan sebagai sebuah tekad untuk bekerja di perusahaan yang sudah berjalan.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Tanjung Bumi diketahui bahwa di Kabupaten

Bangkalan memang banyak terjadi keluarnya tenaga yang potensial ke luar daerah dengan tujuan mencari pekerjaan dengan standar pembayaran yang lebih baik dan lebih menjanjikan untuk jangka panjang.

Aspek kedua yang diujikan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yakni mengenai adanya inovasi dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, dikategorikan **cukup baik**. Dari data yang ada pada tabel 4, dapat dikatakan bahwa hingga saat survey ini diambil belum ada terobosan-terobosan dari pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Camat Tanjung Bumi diketahui bahwa pemerintah telah berperan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan birokratif yang mempermudah untuk membuka usaha baru seperti kemudahan pengurusan akta tanah, PBB, SIUP dan lain-lain. Selain itu pemerintah juga telah berperan dalam pembinaan masyarakat untuk lebih maju baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam segi kemandirian berusaha. Hanya, berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat belum cukup kreatif untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sementara dari pihak pemerintah dan swasta nampaknya masih belum maksimal dalam mensosialisasikan program mereka sehingga masyarakat belum seluruhnya mengetahui adanya terobosan-terobosan atau kemudahan yang dapat mereka manfaatkan.

Sama halnya dengan aspek pertama dan kedua, aspek ketiga yaitu pendampingan dari pemerintah dan pihak swasta, dikategorikan **cukup baik**. Berdasarkan wawancara dengan Camat dapat diketahui bahwa, pendampingan yang dilakukan aparat pemerintah baru sebatas pemberian motivasi, sementara dari pihak swasta berupa adanya pelatihan-pelatihan keterampilan. Namun, nampaknya pendampingan yang dilakukan ini belum terlaksana secara intensif dan terkelola dengan baik.

Selain itu diakui bahwa memang selama ini proses pendampingan belum mendalam dan detail, karena selain keterbatasan dana operasional juga sumberdaya yang tersedia untuk melakukan pendampingan juga masih kurang, karena staff yang dikerahkan untuk melakukan pendampingan tidak sebanding kebutuhan sehingga pemerintah mengambil jalan tengah berupa rotasi agar semua desa dapat terlayani.

Indikator keempat dalam variabel pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesehatan. Jika memperhatikan data pada tabel 4, indikator ini dikategorikan **baik**. Berdasarkan kategori ini dapat dikatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat sudah cukup optimal.

Jika dilihat per aspek, maka hanya aspek pertama, yaitu peran aktif masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan bayi yang mendapat kategori **cukup baik**. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa masih ada masyarakat yang kurang mematuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan yang sederhana seperti tidak sempat atau letak Polindes terlalu jauh sehingga kadang merasa enggan dan bayinya terlihat sehat-sehat saja.

Aspek kedua dalam indikator ini, yaitu rutinitas pemeriksaan kesehatan masyarakat desa di Polindes dikategorikan **baik**. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tanjung Bumi didapatkan informasi bahwa sebenarnya masyarakat cukup memahami dan menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan sekalipun mereka merasa sehat atau jarang sakit.

Namun pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung menunggu hingga merasa perlu berobat atau ketika sudah merasa sakit untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, pada umumnya masyarakat merasa kurang efisien jika harus rutin diperiksa dan lebih memilih untuk melakukan hal lain

ketimbang memeriksakan diri ke Polindes. Hal lain yang menjadi keluhan masyarakat adalah kurang representatifnya sarana yang tersedia di Polindes seperti kurang memadainya ruang tunggu dan lambatnya pelayanan yang mengakibatkan antrian panjang.

Aspek ketiga dalam indikator peningkatan kesehatan ini, yaitu peningkatan gizi balita oleh masyarakat desa, dikategorikan **baik**. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dapat diketahui bahwa, aparat desa telah mensosialisasikan pentingnya peningkatan gizi balita agar proses perkembangan tubuh dan mental anak tidak terganggu. Dalam hal ini diyakini bahwa mayoritas masyarakat telah memahami hal tersebut namun masih belum mengetahui dengan jelas mengenai jenis makanan yang paling optimal gizinya untuk meningkatkan perkembangan anak.

Namun demikian, masyarakat pada umumnya masih kurang antusias terhadap penyuluhan mengenai gizi, karena mayoritas masyarakat memiliki paradigma bahwa pemenuhan kebutuhan gizi berarti pengeluaran ekstra dan dianggap rumit sehingga dalam aplikasinya hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar mampu dan mengerti yang memperhatikan aspek tersebut.

### 3. Pengaruh Program Dasar Pembangunan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melihat hubungan antara variabel program dasar pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menggunakan analisis *korelasi pearson product Moment*.

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{(100)(97803,08) - (2648,731)(3568,811)}{\sqrt{((100)(73739,215) - (2648,731)^2) - ((100)(134055,978) - (3568,811)^2)}}$$

$$= 0,668$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antara Program dasar pembangunan desa dengan Pemberdayaan masyarakat adalah 0,668. Nilai koefisien korelasi ini jika dibandingkan dengan *Kriteria Guilford* menunjukkan hubungan yang sedang.

Sedangkan untuk melihat kecenderungan/prediksi variabel, digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$a = \frac{(3568,811)(73739,215) - (2648,731)(97803,08)}{100(73739,215) - (2648,731)^2}$$

$$a = 11,468$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{(100)(97803,08) - (2648,731)(3568,811)}{(100)(73739,215) - (2648,731)^2}$$

$$b = 0,914$$

Dari perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 11,468 + 0,914X$$

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari  $a$  adalah 11,468, nilai ini menunjukkan bahwa pada saat Program dasar pembangunan desa ( $X$ ) bernilai nol, maka

Pemberdayaan Masyarakat ( $\hat{Y}$ ) akan bernilai 11,468 satuan. Sedangkan nilai dari  $b$  yaitu sebesar 0,914 artinya bahwa ketika terjadi peningkatan program dasar pembangunan desa sebesar satu satuan, maka Pemberdayaan masyarakat akan bertambah sebesar 0,914 satuan, karena koefisien regresi ( $b$ ) bernilai positif +0,914 maka dapat dikatakan bahwa **Semakin meningkat program dasar pembangunan desa maka Pemberdayaan masyarakat akan makin meningkat pula.**

Setelah didapatkan nilai koefisien korelasi dan koefisien regresi ( $b$ ) maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Pengujian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian terhadap nilai koefisien korelasi ataupun dengan nilai koefisien regresi, yang dua-duanya menghasilkan nilai yang sama.

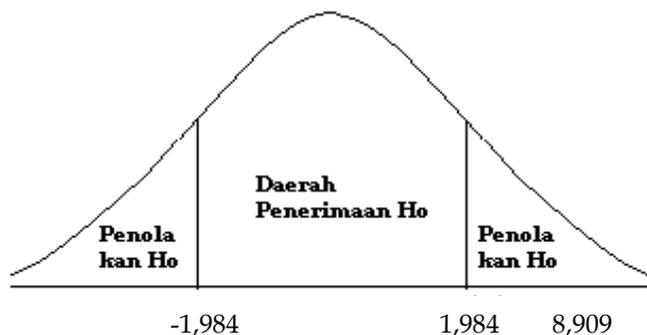
Untuk itu, maka disini akan digunakan salah satu pengujian statistik untuk menguji hipotesis di atas yaitu dengan menggunakan statistik uji t-student dengan melihat tingkat signifikansi koefisien korelasi pearson yaitu:

$$\begin{aligned} t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ &= \frac{0,668\sqrt{100-2}}{\sqrt{1-(0,668)^2}} \\ &= 8,909 \end{aligned}$$

Dalam kasus ini akan diambil tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ . Kriteria uji untuk uji dua arah adalah sebagai berikut:

*Tolak hipotesis  $H_0$  jika  $|t_{hitung}| > t_{tabel}$*

- $t_{tabel}$  :  $t_{\alpha/2(n-2)}$ ,
- $\alpha$  : 5%
- N : 100
- $t_{tabel}$  :  $t_{0,025(98)} = 1,984$



Gambar 1

## Kriteria Penolakan $H_0$

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa (uji t-student) nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  sehingga dengan mengambil resiko kesalahan sebesar 5% penulis berkesimpulan bahwa ada pengaruh program dasar pembangunan desa secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh program dasar pembangunan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus:  $KD = r^2 \times 100 \%$ . Pada perhitungan sebelumnya telah didapatkan nilai  $r = 0,668$  maka KD dapat kita hitung, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= (0,668)^2 \times 100\% \\ &= 44,75\% \end{aligned}$$

Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebesar 44,75% variabel program dasar pembangunan desa memberikan pengaruh atas perubahan-perubahan variabel pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebesar 55,25% pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, latar belakang kultural, dan potensi daerah secara keseluruhan yang mana tidak termasuk lingkup penelitian ini.

#### 4. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Program Dasar Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut: pertama, tidak meratanya tingkat pendidikan di Kecamatan Tanjung Bumi. Di satu sisi terdapat daerah yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi karena banyaknya fasilitas pendidikan di desa tersebut, seperti Desa Telaga Biru. Sedangkan di sisi lain, masih ada desa dengan tingkat pendidikan yang rendah, dikarenakan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah masih kurang, seperti Desa Togungah.

Kedua, sulitnya sarana transportasi untuk sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Bumi, seperti Desa Togungah yang berada di daerah pegunungan. Hal ini menimbulkan akses informasi, teknologi dan ekonomi semakin sulit dijalankan sehingga tidak heran masyarakat Desa Togungah lebih banyak bertani dan beternak di daerahnya sendiri.

Ketiga, potensi alam di sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Bumi kurang potensial untuk diberdayakan. Kondisi tersebut terutama terjadi di daerah-daerah pegunungan dan terpencil, jauh dari informasi dan jangkauan pemerintah daerah setempat.

Keempat, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa pembangunan desa hanya dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa saja.

Kelima, tingkat kemampuan pelaksanaan pembangunan desa yang masih rendah sehingga pelaksanaan pembangunan desa belum optimal.

Keenam, kurangnya komitmen Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan pelaksanaan pembangunan desa yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan rencana.

#### E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka pada penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: pertama, implementasi Program Dasar Pembangunan Desa di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dapat diketahui bahwa implementasinya masih belum optimal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa program dasar

pembangunan desa masih perlu ditingkatkan mengenai hal-hal tersebut diatas dan perlunya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat agar lebih siap untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.

Kedua, pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Aparatur desa masih belum maksimal dalam mensosialisasikan program sehingga tidak seluruh masyarakat yang potensial mengetahui adanya terobosan-terobosan atau kemudahan dari pemerintah yang dapat mereka manfaatkan untuk kepentingan usaha mereka. Selain itu masyarakat dinilai masih kurang kreatif dalam menggali potensi daerahnya sehingga karya-karya nyata masih belum tampak.

Ketiga, berdasarkan hasil pengujian statistik dapat dikatakan bahwa program dasar pembangunan desa mempunyai hubungan yang kuat dengan pemberdayaan masyarakat.

Keempat, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Dasar Pembangunan di desa Togungguh dan Telaga Biru yang hra menjadi perhatian pihak-pihak terkait.

Adapun saran yang penulis ajukan adalah: pertama, perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan berupa teknologi pertanian, perikanan dan sektor lainnya kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting agar masyarakat mampu membuka lapangan usaha sendiri tanpa harus bergantung kepada bantuan pemerintah.

Kedua, perlu adanya pengarahan lebih lanjut kepada masyarakat untuk memanfaatkan semua fasilitas yang telah disediakan pemerintah seperti Polindes, Kredit Usaha Kecil maupun Koperasi Unit Desa untuk kesejahteraan mereka. Selain itu seyogyanya masyarakat dihimbau untuk mampu bekerjasama dengan baik dengan semua pihak yang penting dalam upaya perintisan usaha sehingga dapat dihasilkan sebuah ide dan karya kreatif yang memiliki daya saing tinggi, yang mana hal tersebut dapat dijadikan salah satu argumen dari aparat agar tenaga kerja potensial tidak keluar dari daerahnya.

Ketiga, pemerintah agar lebih cermat dalam mengatur jadwal penyuluhan dan pembinaan hingga semua lapisan masyarakat di 14 desa di Kecamatan Tanjung Bumi mendapatkan bagian pelatihan dan pembinaan yang proporsional dan memadai sesuai dengan potensi alami masing-masing desa. Diharapkan dengan perbaikan pola kerja dan pematangan rencana, proses pemberdayaan masyarakat dapat membuahkan hasil yang lebih signifikan.

Keempat, selain masyarakat yang diberdayakan, aperatur juga diberdayakan dengan pelatihan-pelatihan, agar nantinya di dalam perumusan kebijakan akan lebih sempurna dan tepat sasaran. Agar pembangunan merata dan tepat sasaran atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang berupa uang tunai efektif. Maka pemerintah harus membuat ketentuan-ketentuan yang dapat merangsang Desa/Kelurahan untuk membangun Desa/Kelurahannya seperti: Desa/Kelurahannya dapat berhasil di dalam program-program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan diberikan penghargaan berupa penambahan dana dana yang diterima oleh Desa/Kelurahan tersebut. Namun sebaliknya, bila ditemukan penyelewengan dana dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan tidak tercapai dikenai sanksi yang tegas, seperti Pengurangan dana tersebut dan bisa juga pemberhentian pemberian dana tersebut.

## REFERENSI

### A. Buku-buku

- Cook, S. and Macaulay, S. 1996. *Perfect Empowerment*, (Terjemahan Paleopi Tyas R). Jakarta: Gramedia.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo.
- Montgomery, J.D. and Esman, M.J. 1965. *Development Administration in Malaysia*. Report to the Government Malaysia. Kuala Lumpur.
- Mustopadidjaja, A.R. 1996. *Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : Haji Masagung.
- Ndraha, T. 1985. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prijono, O.S. dan Pranaka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Siagian, S.P. 1989. *Filsafat Organisasi*. Jakarta: Haji Masagung.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia.
- Wrihatnolo, R.R. dan Rian, N. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

### B. Peraturan Perundangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ Tertanggal 22 Maret 2005 tentang Program Dasar Pembangunan Desa.
- Ditjen PMD Depdagri RI, 1994, *Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan*, Jakarta: Ditjen PMD Depdagri RI.
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 Tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010
- Kecamatan dalam Angka 2007.